



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



**PERENCANAAN KOMUNIKASI BAWASLU PROVINSI RIAU  
DALAM MENYOSIALISASIKAN ELEKTRONIK PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID)**



**UIN SUSKA RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

**M Yunus**

**NIM.11743101570**


**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**كلية الدعوة و الاتصال**  
**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**


Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : M Yunus  
 NIM : 11743101570  
 Judul : **Perencanaan Komunikasi Bawasl Provinsi Riau Dalam Menyosialisasikan Elektronik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID)**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:  
 Hari : Jum'at  
 Tanggal : 22 Juli 2022

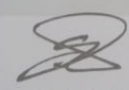

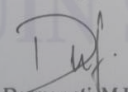
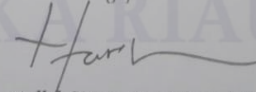
Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022



**Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A, Ph.D**  
 NIP.198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I   <b>Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A, Ph.D</b> NIP.198111182009011006	Sekretaris/ Penguji II   <b>Mustafa, M.I.Kom</b> NIK. 130 417 024
Penguji III   <b>Darmawati, M.I.Kom</b> NIK. 130 417 026	Penguji IV   <b>Hayatullah Kurniadi, S.I.Kom, MA</b> NIP. 19890619201801 1 004

**“ PERENCANAAN KOMUNIKASI BAWASLU PROVINSI RIAU DALAM  
MENYOSIALISASIKAN ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI ”**

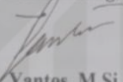
Disusun oleh:

**M YUNUS**

**11743101570**

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 01 Juni 2022

Pembimbing,

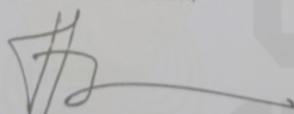


**Yantos, M.Si**

**NIP. 19710122 200701 1016**

Mengetahui,

**Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,**



**Dr. Muhammad Badri, M.si**

**NIP. 198103132011011004**

**UIN SUSKA RIAU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

No. : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
di-  
Tempat.

*Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : M Yunus

NIM : 11743101570

Judul Skripsi : Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam Menyosialisasikan Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pembimbing,

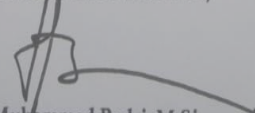


Yantos, M.Si

NIP./19710122 200701 1016

Mengetahui :

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,



Dr. Muhammad Badri, M.Si

NIP. 19810313 201101 1 004

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : M Yunus

NIM : 11743101570

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“PERENCANAAN KOMUNIKASI BAWASLU PROVINSI RIAU DALAM  
MENYOSIALISASIKAN ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID)”** adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 01 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



**M YUNUS**

**NIM. 11743101570**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : M Yunus**  
**Jurusan : Ilmu Komunikasi**  
**Judul : Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyosialisasikan Elektronik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minim nya informasi yang masuk terkait kepemiluan dan non kepemiluan yang ada di Bawaslu Provinsi Riau hal ini menyangkut tentang keterbukaan informasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai bentuk kewajiban ini, Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2021 mencoba Terobosan baru dengan merilis Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) yang sebelumnya berifat konvensional menjadi digital sebagai wadah kebutuhan informasi yang di inginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Atas dasar itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam menyosialisasikan Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dimana menggambarkan terkait fenomena yang terjadi. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teori perencanaan komunikasi oleh Cultip, Center dan Broom dengan metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini terkait perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau dalam menyosialisasikan E-PPID menghasilkan: 1. Penemuan Fakta dilakukan dari melihat data keterlibatan masyarakat terkait adanya E-PPID, terlihat masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses E-PPID sebagai salah satu sarana penyedia informasi 2. perencanaan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama kabupaten kota dan melaksanakan program pendukung guna menyukseskan E-PPID Bawaslu Provinsi Riau, 3. Komunikasi yang dilakukan adalah dengan bentuk komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung, 4. Evaluasi dilakukan setiap akhir program kegiatan, tahapan dan tahunan untuk mengetahui seberapa efektif program kerja yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau

**Kata Kunci : Perencanaan Komunikasi, Sosialisasi, E-PPID**



## ABSTRACT

**Name** : M Yunus  
**Majors** : Communication Science  
**Title** : **Communication Planning Bawaslu Riau Province in socializing Electronic Information and Documentation Management Officers (E-PPID)**

This research is motivated by the lack of incoming information related to electoral and non-electoral elections in the Bawaslu of Riau Province, This is related to the disclosure of information which has been regulated in Law Number 14 of 2008 as a form of this obligation In 2021 the Bawaslu of Riau province will try a new breakthrough by releasing Electronic Information and Documentation Management Officers (E-PPID) which was previously conventional into digital as a place for the information that are wanted and needed by the public wants. On that basis this research aims to find out the communication planning of the Riau Province Bawaslu in socializing E-PPID. The reseach uses qualitative method that produces descriptive data which describes the phenomena that occur. The theory used in this research is the theory of communication planning by Cultip, Center and Broom with data collection uses, observation, interviews and documentation. The results of this research related to the communication planning of the Riau Province Bawaslu in socializing the E-PPID resulted in : 1. Fact Finding was carried out by looking at public involvement data related to the existence of E-PPID, it was seen that there was still a lack of public involvement in accessing E-PPID as a means of providing information., 2. planning is carried out through coordination meetings with regencies and cities and implementing supporting programs for the success of the E-PPID Bawaslu Riau Province, 3. The communication carried out is in the form of direct communication and indirect communication 4. Evaluation is carried out at the end of each activity program, stage and yearly to find out how effective the work program of the Riau Province

Bawaslu

**Keywords:** *Communication Planning, Socialization, E-PPID*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kedahirat Allah Subhanahuata'ala atas segala kelimpahan rahmat dan karunianya, sholawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan dan suri tauladan bagi umat islam sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Menyosialisasikan Elektronik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (E-PPID).** Sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjanastrata satu (S1) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau

Dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak sedikit jasa,yang paling istimewa dan penuh cinta kasih sayng kepada kedua orang tua, Ayahanda Casnato dan Ibunda Arifah yang telah memberikan segala dukungan baik moril maupun semangat dan segalanya demi Ananda dalam menyelesaikan jenjang pendidikan ini

Sumbangan yang penulis terima dari berbagai pihak,yang telah membantu baik moril maupun materil, oleh sebab itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas“ud Zein, M.Pd Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan I, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

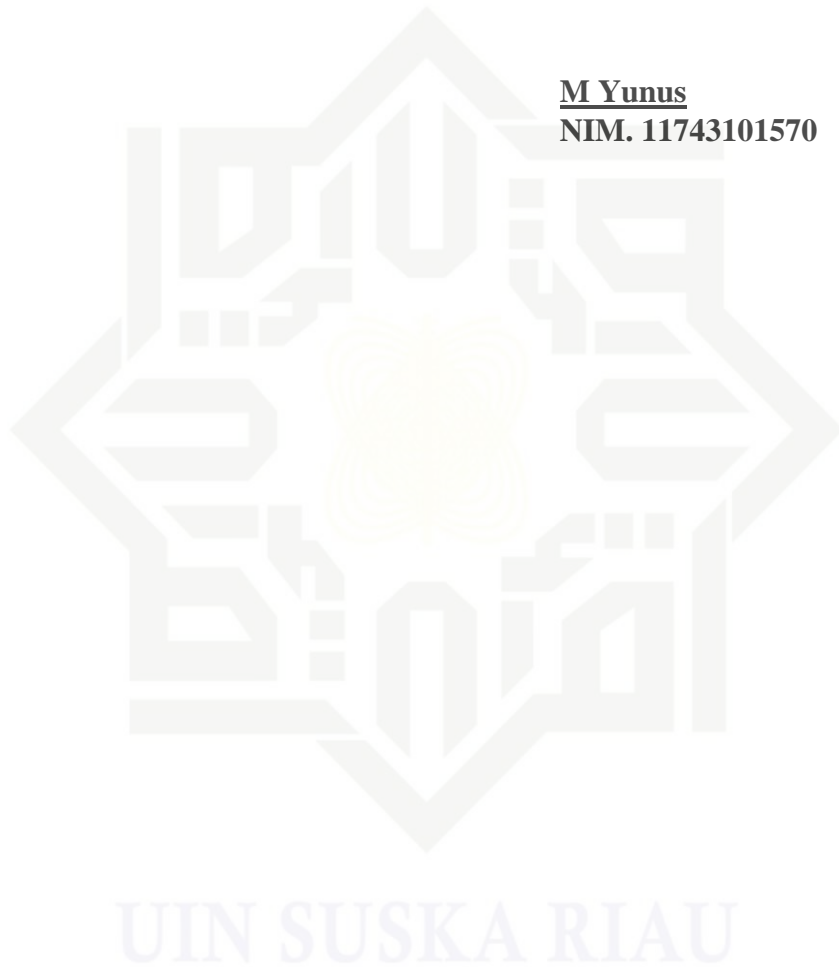
3. Bapak Dr. M Badri, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis M.I.Kom Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Yantos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi penulis dan juga selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis hingga akhir bimbingan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satusatu namanya. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
6. Kepala Staff Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang menjadi referensi penulis selama perkuliahan.
7. Kepada kakak dan adik saya Naisa, Gaung al faris dan Gadis Arifah Terima kasih atas dukungan secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada Bawaslu Provinsi Riau yang telah membantu dalam menyediakan fasilitas dalam penelitian ini
9. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-satu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat di selesaikan

Akhir kata sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru Juni 2022

Penulis

**M Yunus**  
**NIM. 11743101570**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Penegasan Istilah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
2.1 Kajian Terdahulu .....	10
2.2 landasan Teori .....	16
2.3 Kerangka Berpikir .....	24
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>
3.1 Desain Penelitian .....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
3.3 Sumber Data/ Informasi Penelitian .....	27
3.4 Informan Penelitian .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6 Validasi Data .....	30
3.7 Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>
4.1 Sejarah Bawaslu Riau .....	33
4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Riau .....	36
4.3 Visi dan Misi Bawaslu .....	37
4.4 Logo Bawaslu .....	37



4.5 Profil PPID Bawaslu Riau .....	38
4.6 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Riau .....	38
4.7 Tugas dan Wewenang PPID .....	39
4.8 Visi dan Misi PPID .....	41
4.9 logo PPID.....	41

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1 Hasil Penelitian .....	42
5.2 Pembahasan .....	66

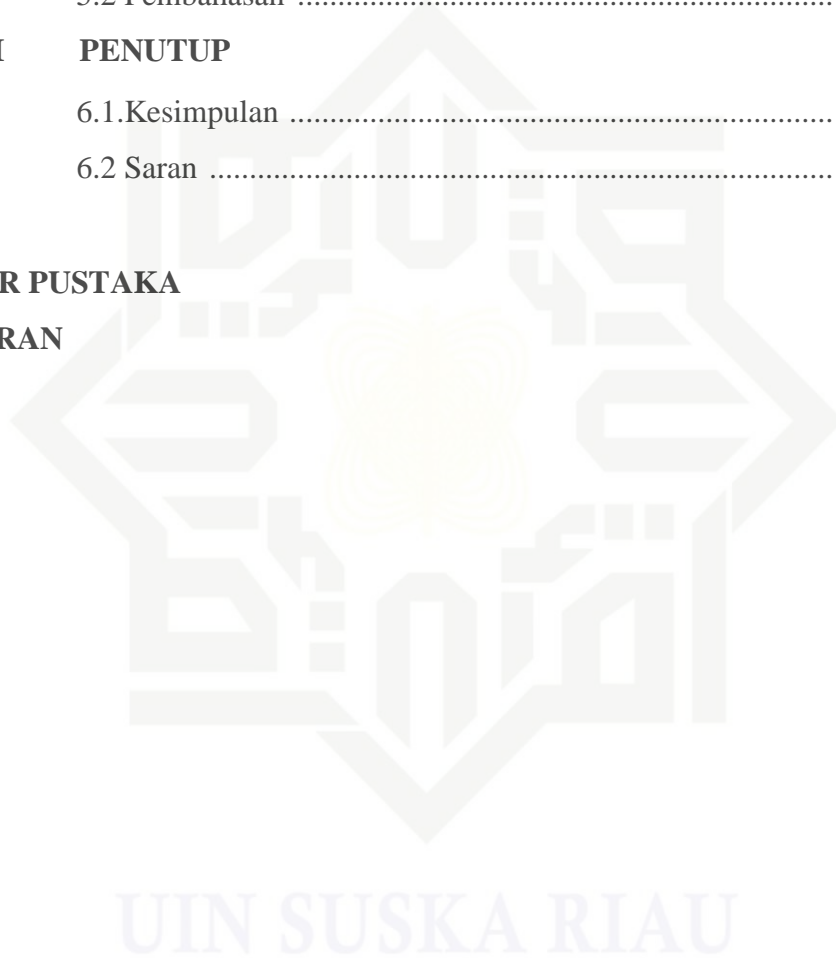
## **BAB VI**

### **PENUTUP**

6.1. Kesimpulan .....	74
6.2 Saran .....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	28
Tabel 5.1 Daftar Nama Informan .....	46
Tabel 5.2 Tabel Rekap Pemohon Informasi 2022.....	46
Tabel 5.3 Tabel Rekap Pemohon Informasi 2022.....	47



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau .....	36
Gambar 4.2 Logo Bawaslu.....	37
Gambar 4.3 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Riau.....	38
Gambar 4.4 Logo PPID bawaslu Riau .....	41
Gambar 5.1 Penghargaan lembaga Informatif Se-Provinsi Riau .....	48
Gambar 5.2 Penghargaan lembaga Informatif Se-Indonesia .....	48
Gambar 5.3 Rapat Pengenalan E-PPID.....	52
Gambar 5.4 Program Seminar Pengelolaan E-PPID .....	53
Gambar 5.5 Program Monitoring E-PPID Se-Kabupaten/Kota .....	54
Gambar 5.6 Instagram Bawaslu Provinsi RiauRiau.....	57
Gambar 5.7 Instagram PPID Bawaslu Provinsi Riau.....	58
Gambar 5.8 Tiktok PPID Bawaslu Provinsi Riau.....	58
Gambar 5.9 Facebook PPID Bawaslu Provinsi Riau .....	58
Gambar 5.10Facebook Bawaslu Provinsi Riau.....	59
Gambar 5.11 Youtube Bawaslu Provinsi Riau .....	59
Gambar 5.12 Website Bawaslu Provinsi Riau .....	59
Gambar 5.13 Website PPID Bawaslu Provinsi Riau .....	60
Gambar 5.14 Konten Informatif Bawaslu Provinsi Riau .....	60
Gambar 5.15 Konten Video Informatif Bawaslu Provinsi Riau .....	61
Gambar 5.16 Kotak Saran Digital E-PPID Bawaslu Riau .....	62
Gambar 5.17 Tata cara permohonan Informasi Bawaslu Riau .....	67
Gambar 5.18 Podcast Bawaslu Provinsi Riau .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1: Dokumentasi Hasil Penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Era keterbukaan informasi telah dimulai. Hal ini di latar belakang oleh tuntutan akan adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.<sup>1</sup>

Keterbukaan informasi publik di Indonesia menjadi salah satu tuntutan konstitusi yang berfungsi sebagai media pertanggung jawaban setiap badan publik dalam pelaksanaan kegiatan dan pemerintahan.<sup>2</sup>

Pelayanan publik dan keterbukaan informasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Prinsip keterbukaan harus menjadi salah satu landasan utama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, dan kita sadari bersama bahwa tugas pelayanan publik itu sendiri merupakan salah satu tugas pokok dari Pemerintah.

Akses terhadap informasi publik tidak hanya sebagai hak publik untuk memperoleh informasi yang relevan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang berkaitan dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal tersebut menjadi sinyal pentingnya informasi dalam sebuah institusi

Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik wajib membentuk

<sup>1</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Sejarah, <https://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/13>, diakses pada 28 Agustus 2021

<sup>2</sup> Ningtyas, Rusmana, and Suminar, "*Indeks Kompetensi Pengelolaan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Pertanian.*"



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mana tujuannya untuk memberi kepuasan pelayanan kepada masyarakat. berhasil atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tergantung pada implementor kebijakan, dalam hal ini adalah pemerintah. Dari waktu ke waktu pelayanan publik terus ditingkatkan oleh pemerintah, salah satunya dengan cara membuat suatu inovasi di bidang elektronik. Pemanfaatan teknologi di bidang pemerintahan tersebut sering kita sebut *e-government*. *E-government* pada hakikatnya merupakan suatu inovasi dari pemerintah yang tujuannya mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pemberian pelayanan publik.<sup>4</sup>

Landasan hukum yang membahas tentang keterbukaan informasi publik adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan menjalankan keterbukaan informasi publik merupakan ciri negara yang demokratis. Keterbukaan Informasi Publik secara lebih luas mengatur aspek-aspek kebebasan informasi, dengan tujuan menjamin dan melembagakan hak-hak publik untuk mengakses informasi penyelenggara pemerintah disemua lini dan semua level

<sup>3</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI., *Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Jakarta: Pusat Komunikasi dan Humas. 2010. hlm. 20.

<sup>4</sup> Dhea Desita Delistiana, Hanny Purnamasari, Gun Gun Gumilar, Gorontalo *Journal of Government and Political Studies* Volume 3, Nomor 2, October 2020



birokrasi. Subjek Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah publik, warga negara, dan setiap orang.<sup>5</sup>

Tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu: menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan public untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Untuk mencapai good governance, akan adanya tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Namun untuk mencapai tahapan ini tidak terlepas dari proses komunikasi. Sebuah proses komunikasi tidak luput dari banyak hambatan, karena itu perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi semua hambatan hambatan yang ada agar mencapai efektivitas komunikasi.

Perencanaan komunikasi yaitu usaha membuat sebuah rancangan pelaksanaan sebuah bentuk kegiatan komunikasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan di lapangan hingga monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan komunikasi tersebut.<sup>6</sup>

Bawaslu Riau merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada seluruh wilayah Provinsi Riau, sebagai lembaga pengawasan Bawaslu berkewajiban atas pemenuhan hak atas informasi dari Bawaslu Riau kepada masyarakat Riau dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu atau pilkada di wilayah Riau, Bawaslu Riau dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, tidak saja untuk terus

<sup>5</sup> Dhea Desita Delistiana, Hanny Purnamasari, Gun Gun Gumilar, Gorontalo *Journal of Government and Political Studies* Volume 3, Nomor 2, October 2020, hlm. 90.

<sup>6</sup> Ibnu Hamad, "Pengertian Perencanaan Program Komunikasi (PPK)", Modul Ilmiah, 2014, Hlm 1-2.



melakukan upgrade pemahaman pengawasan dan pemilu, penguasaan regulasi juga berkomitmen membangun koordinasi dan kerja sama baik internal (jajaran pengawas pemilu ) maupun eksternal (*stakeholders*). koordinasi dan kerja sama yang di lakukan tidak saja dalam rangka optimalisasi pengawasan tetapi juga sebagai bentuk tugas untuk memenuhi tata kelola yang baik<sup>7</sup>

Salah satu program Bawaslu provinsi Riau yang juga merupakan Badan Publik yang punya kewajiban menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan pelayanan dan penyebaran informasi publik kepada masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang mana PPID ini bertanggung jawab di bidang pelayanan informasi, pengelola informasi, pendokumentasian dan arsip juga pengaduan dan sengketa di badan publik.

PPID membutuhkan kompetensi pengelolaan informasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan informasi publik, misal mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan seluruh informasi publik baik dalam bentuk fisik maupun digital dari setiap satuan kerja melalui PPID Pembantu/ pejabat fungsional.<sup>8</sup>

PPID sebagai bagian yang berwenang dan memiliki tanggung jawab dalam bidang penyimpanan,pendokumentasian serta pelayanan informasi dibadan publik salah satu nya Bawaslu<sup>9</sup>

Sebagai bentuk untuk memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Bawaslu Provinsi Riau melakukan reformasi pelayanan dari konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital, oleh sebab itu Bawaslu Provinsi Riau meluncurkan E-PPID terintegrasi yaitu sebuah pelayanan PPID yang dipadukan dengan pemanfaatan

<sup>7</sup> Eddy Syarifuddin.2014 , *Dinamika Pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Bumi Lancang Kuning*. Pekanbaru, hlm,2

<sup>8</sup> Kenda, “Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.”

<sup>9</sup> Liesmaya, Dimyati, And Praceka, “Strategi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Polda Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik.”



teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi di Bawaslu Provinsi Riau.

Peluncuran layanan E-PPID terintegrasi Bawaslu Provinsi, sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini sejalan dengan pengembangan dan penguatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Bawaslu yang terus berupaya meningkatkan kinerja berbasis teknologi dengan pemanfaatan dan pengembangannya teknologi informasi dan komunikasi.<sup>10</sup>

Secara umum yang terlihat, eksistensi dari Elecetronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkesan belum berjalan sepenuhnya dalam pelayanan informasi kepada publik dengan baik pada Provinsi Riau dengan berbagai kendala sehingga dinilai masih belum termasuk pada pelayanan yang baik karena kurangnya stabilnya dalam keterbukaan informasi kepada dan juga dalam hal pengetahuan informasi masih minimnya masyarakat yang belum mengetahui adanya E-PPID di Bawaslu Provinsi Riau itu sendiri. Hal ini menjadi perhatian penulis untuk mempelajari atau meneliti tentang E-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Bawaslu Provinsi Riau dalam berbagai problema yang terjadi.

E-PPID yang resmi diluncurkan pada tanggal 25 Agustus 2021, dikarenakan E-PPID merupakan hal baru bagi masyarakat makan Bawaslu Provinsi Riau perlu melakukan peencanaan komunikasi yang baik dalam mensosialisasikan E-PPID agar masyarakat lebih mengetahui. Dengan melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul **“PERENCANAAN KOMUNIKASI BAWASLU PROVINSI RIAU DALAM MENYOSIALISASIKAN ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID)”**

<sup>10</sup> Website resmi Bawaslu RI, dalam: <https://bawaslu.go.id/> diakses pada 22 juni 2022





## 1.2 Penegasan istilah

Untuk menghindari salah penafsiran dalam kata kata judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen, tanpa adanya sebuah perencanaan maka fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan merupakan tahapan paling penting terutama dalam menghadapi perubahan situasi yang sifatnya dinamis. Oleh karena itu, dalam sebuah perencanaan dibutuhkan prosedur yang rasional dan sistematis sehingga serangkaian pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi memiliki arah sekaligus memudahkan dalam tindakan perbaikan jika terjadi hambatan. Perencanaan adalah tujuan yang ingin dicapai melalui pendayagunaan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis dan rasional kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada secara lebih efektif dan efisien.<sup>11</sup>

### 2. Komunikasi

Komunikasi berasal dari kata *communicare* yang berarti “membuat sama”. Istilah dari komunikasi (*communication*) berasal dari kata latin *communicatus*, dan bersumber dari kata

<sup>11</sup>Mohammad Ridwan, 2012. *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*. Jakarta : PT Sofmedia. hlm. 4

communis yang berarti sama . kata sama di sini maksudnya adalah sama makna.<sup>12</sup>

Nilai penting dari komunikasi bukan hanya sekedar terletak pada sampainya informasi tersebut, tetapi terletak pada pemahaman yang sama makna-makna yang ada di dalamnya.

### 3. Bawaslu Provinsi Riau

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Bawaslu diatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.<sup>13</sup>

### 4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan suatu informasi tentang sesuatu kabar atau berita. Terjadinya sosialisasi membuat tersebar suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak, dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampai pesan dan penerima pesan<sup>14</sup>

### 5. E-PPID

E-PPID merupakan system pelayanan berbasis online yang terintegrasi untk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang di perlukan tentang pemilihan umum,

<sup>12</sup> Onong Uchjana Effendy. 2003, *Ilmu komunikasi; Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya. Hlm.9

<sup>13</sup> <https://riau.bawaslu.go.id/> diakses pada 23 juni 2022

<sup>14</sup> Sutaryo, "Dasar-Dasar Sosialisasi", (Jakarta: Rajawali Press, 2004).



pemilihan kepala daerah dan informasi lainnya seputar bawaslu, dari tingkat pusat, hingga kabupaten.<sup>15</sup>

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perencanaan Komunikasi Bawaslu provinsi Riau dalam mensosialisasikan Electronic Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (E-PPID) ?

### 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Komunikasi Bawaslu provinsi Riau dalam mensosialisasikan Electronic Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (E-PPID)

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan pemikiran terkait teori yang digunakan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi landasan teori bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dalam mengembangkan penelitian.

##### b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi praktisi Public Relations/Humas dalam mengelola informasi pada lembaga Pengawasan Pemilhan Umum Provinsi Riau
- 3) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi refrensi serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

<sup>15</sup> <https://ppid.riau.bawaslu.go.id/> diakses pada 23 juni 2022





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan membahas latar belakang pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang kajian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir.

#### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data.

#### BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini akan berisikan tentang sejarah Bawas;u Provinsi Riau, visi dan misi, dan struktur organisasi

#### BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisikan uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan

#### BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar lebih baik lagi kedepannya

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian dan untuk menghindari duplikasi pada design dan temuan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu. Selain itu dengan mengenal kajian terdahulu, maka sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan design penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah dilaksanakan. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian penulis:

Peneliti Annisa Citra Triyandra (2017) dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Bappeda Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan E-Planning”**. Dengan tujuan untuk mengetahui perencanaan komunikasi Bappeda Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan *E-Planning*, adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: perencanaan dalam menentukan komunikator, perencanaan dalam menetapkan target sasaran, perencanaan dalam menyusun pesan, dan perencanaan dalam memilih media yang digunakan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang perencanaan komunikasi dengan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian dan lokasi penelitian yang dilakukan<sup>16</sup>

Peneliti Nurjanah (2018) dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis”**. Dengan tujuan penelitian untuk menganalisis potensi objek wisata dan perencanaan komunikasi dalam mengembangkan potensi wisata di Kabupaten Bengkalis. Adapun metode yang digunakan dalam

<sup>16</sup> Annisa Citra Triyandra, *“Perencanaan Komunikasi Bappeda Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan E-Planning”*. Skripsi Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Suska Riau, 2017.

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model komunikasi interaksional dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kelompok fokus, dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah proses perencanaan komunikasi yaitu: proses perencanaan pesan, perencanaan media dan evaluasi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama meneliti tentang perencanaan komunikasi, metode yang digunakan dalam penelitian, sedangkan perbedaannya adalah objek dan lokasi penelitian yang dilakukan<sup>17</sup>

Peneliti Nancy Citra Purnaningtyas(2017), Nofha Rina dengan judul *“Perencanaan Komunikasi Program Ojek Makanan Balita (Omaba) Dalam Membentuk Persepsi Orang Tua Mengenai Anak Gizi Buruk”*. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perencanaan komunikasi yang dilakukan pada program OMABA. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah tahapan pertama yaitu analisis epideimologi, tahapan kedua yaitu menyusun desain komunikasi, tahapan ketiga menentukan isi pesan yang akan disampaikan, tahapan kelima ialah menentukan terhadap penggunaan media, dan tahapan yang terakhir adalah menyusun strategi pelaksanaan dan rencana tindakan. Adapaun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah tujuan penelitian, sama-sama meneliti tentang perencanaan komunikasi, dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah objek penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh ”Annisa Citra Triyandra, Nita Rimayanti” pada tahun 2017 yang berjudul *“Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan Program Smart City”* penelitian ini membahas tentang Program smart city dijalankan oleh Dinas

<sup>17</sup>Nurjanah, *“Perencanaan Komunikasi Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Bengkalis”*. 2018.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) kota Pekanbaru, Bidang Penyelenggara *e-Government*. Penelitian ini menggunakan teori Perencanaan komunikasi oleh Cultip dan Center. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan program smart city dengan 7 indikator, mengumpulkan informasi, menetapkan ide dan tujuan, sasaran, penjadwalan, anggaran, pertanggung jawaban, pelaksanaan. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan Teori perencanaan Komunikasi dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pemilihan tempat penelitian.<sup>18</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh “Maria Ulfa Batoebara, Junaidi Junaidi pada tahun 2018 yang berjudul **“Perencanaan Komunikasi Fasilitator Kesehatan Dalam Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)”** penelitian ini membahas tentang Perencanaan Komunikasi Fasilitator Kesehatan Dalam Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). dalam penulisan dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Komunikasi Fasilitator Kesehatan Dalam Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui 4 indikator dengan setiap indikator memiliki poin masing masing. Penelitian ini menggunakan teori Cultip dan center. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama menggunakan Perencanaan Komunikasi dalam hal pembahasan dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada pemilihan tempat.<sup>19</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh “Intan Safitriani M” Tahun 2017 dengan judul **“Peran Public Relations Dalam Mensosialisasikan Perusahaan Asuransi Pt.**

<sup>18</sup>Triyandra, “perencanaan komunikasi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian kota pekanbaru dalam mensosialisasikan program smart city.”

<sup>19</sup>Batoebara and Junaidi, “Perencanaan Komunikasi Fasilitator Kesehatan Dalam Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).”

*Prudential Life Assurance Cabang Makassar*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teori model Perencanaan Komunikasi Oleh Cultin dan Center. Peran public relations PT. Prudential *Life Assurance* dalam Mensosialisasikan Perusahaan yaitu dengan beberapa peranan 1) Menjaga hubungan harmonis dengan beberapa pihak bertujuan untuk mendapat nilai positif dimata publik. 2) Menghadapi manajemen isu dengan cara melakukan analisa terhadap isu-isu yang muncul dalam perusahaan, meminta pendapat atau opini publik dan menjawab keluhan masyarakat dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. 3) Melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi dalam mensosialisasikan visi dan misi perusahaan seperti membentuk citra perusahaan, mempublikasikan program-program perusahaan, memberi pengarahan pada agen, program sosialisasi, dan kegiatan seminar. 4) Melakukan strategi komunikasi dalam mensosialisasikan visi dan misi dengan beberapa langkah, mulai dari planing dan progremming, *actions* dan *communications* dan terakhir *evaluation*. Faktor pendukung dan penghambat peran public relations dalam mensosialisasikan visi dan misi perusahaan asuransi PT. Prudential *Life Assurance* Cabang Makassar yaitu: faktor pendukung internal, terdiri dari sumber daya (SDM) yang berkompeten,fasilitas pelayanan serta kerjasama. Faktor pendukung eksternal adalah adanya dukungan dan respon dari publik terkait program-program yang dilakukan public relations dalam memsosialisasikan visi dan misi perusahaan. faktor pendukung tersebut terdapat pula faktor penghambat, di antaranya: faktor internal perusahaan yaitu adanya agen yang tidak menjelskan dengan baik tentang prosedur berasuransi, eksternal perusahaan yaitu: adanya miskomunikasi antara nasabah dan agen yang menimbulkan komplain dari nasabah terhadap pelayanan asuransi Prudential.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Intan Safitriani MPeran *Public Relations* Dalam Mensosialisasikan Perusahaan Asuransi Pt. Prudential *Life Assurance* Cabang Makassar. Makasar: Uin Alauddin Makassar. , 2015.





Selanjutnya penelitian yang di teliti Asrizal (2017) dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Humas Pemerintah Daerah dalam Mensosialisasikan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-PATEN) di Kabupaten Siak”**. Masalah pada penelitian ini adalah pemerintah berharap program e-PATEN ini tersosialisasikan dengan sukses guna pencapaian visi misi dari kabupaten siak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Komunikasi Humas Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan program e-PATEN di Kabupaten Siak, Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif, dimana dalam mensosialisasikan E-PATEN Humas Pemerintah melalui berbagai proses yaitu: analisa khalayak, Penentuan tujuan, Pemilihan media, Rancangan pesan, Evaluasi Program. Yang membedakan pada penelitian ini dengan penulis adalah dari segi lokasi, waktu dan objek penelitian<sup>21</sup>

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Rini Nurkhalida ditahun 2018 dengan judul **“Perencanaan Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) dalam Mensosialisasikan Produk Syariah di Kota Pekanbaru”**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diawali dengan penemuan fakta melalui wawancara, perencanaan melalui segmentasi nasabah, komunikasi dilakukan secara langsung dan komunikasi tidak langsung, dan evaluasi pada setiap akhir bulan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori model komunikasi Cultip dan Center dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan lokasi penelitiannya<sup>22</sup>

Selanjutnya penelitian oleh Fahrul Rozi yang berjudul **“Perencanaan Komunikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan**

<sup>21</sup> Asrizal, *“Perencanaan Komunikasi Humas Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (E-Paten) Di Kabupaten Siak”*. Skripsi Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Suska Riau, 2017 .

<sup>22</sup> Rini Nurkhalidah, *“Perencanaan Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) Dalam Mensosialisasikan Produk Syariah Di Kota Pekanbaru”*, 2018.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Olahraga Dan Kebudayaan Indragiri Hilir Dalam Mempromosikan Pulau Cawan Sebagai Objek Wisata**". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan kabupaten Indragiri Hilir dalam mempromosikan sehingga menarik minat pengunjung objek wisata pulau cawan adalah menggunakan media online. Perbedaan dari penelitian ini ialah lokasi penelitian dan objek penelitian.<sup>23</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Irza Darini Paramitha, Universitas Islam Bandung tahun 2015 dengan judul **"Perencanaan Komunikasi Bank Mandiri dalam Upaya meningkatkan Kualitas Pelayanan"**. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan model perencanaan komunikasi Cultip dan Center. Hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari Bank Mandiri Cabang Simpang Tiga, Tarakan. Perencanaan komunikasi yang dilakukan bertahap dari mengidentifikasi masalah, merencanakan, berkomunikasi dan melakukan evaluasi. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada perencanaan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan sedangkan penulis berfokus pada perencanaan komunikasi Bawaslu dalam melakukan sosialisasi. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan model perencanaan komunikasi Cultip dan Center<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Fahrul Rozi "Perencanaan Komunikasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Dan Kebudayaan Indragiri Hilir Dalam Mempromosikan Pulau Cawan Sebagai Objek Wisata", Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN SUSKA Riau, 2020.

<sup>24</sup> Irza, "Perencanaan Komunikasi Bank Mandiri Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan", Universitas Islam Bandung, 2015.

## 2.2 Landasan Teori

### 1. Perencanaan

#### a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan<sup>25</sup>.

Menurut Berger dalam buku Morissan adalah pencetus teori rencana sebagai salah satu teori yang cukup terkenal dalam ilmu komunikasi. Teori rencana menjelaskan proses yang dilalui seseorang dalam merencanakan perilaku komunikasi mereka. Studi mengenai rencana komunikasi sebagai salah satu bidang kognitif manusia ini mendapatkan perhatian besar dari para ahli khususnya para ahli psikologi. Para ahli sebelumnya tidak terlalu memberikan perhatian pada hubungan antara rencana kognitif manusia dengan prilakunya, dan Berger berharap dapat menjembatani kekosongan ini dengan berbagai riset dan teorinya.<sup>26</sup>

#### b. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu cara unsur yang sangat penting karena merupakan titik awal untuk bekerjanya suatu organisasi, oleh karena itu perencanaan dibuat agar dapat berfungsi untuk:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan masalah.
- 2) Memberi arahan atau pedoman pada tujuan yang akan dicapai.
- 3) Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.

<sup>25</sup> Hafied Cangara. 2013. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 22

<sup>26</sup> Rosady Ruslan. 2003. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm.132



- 4) Melakukan perkiraan terhadap kendala yang mungkin terjadi dan hasil yang akan diperoleh.
- 5) Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.
- 6) Memberi kesempatan untuk memilih alternatif terbaik guna mendapatkan hasil yang lebih baik.
- 7) Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi.
- 8) Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dahulu.
- 9) Penetapan mekanisme pemantauan dan instrumen alat ukur untuk keperluan evaluasi.

## 2. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi berasal berasal dari perkataan latin *Communis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih<sup>27</sup>. seiring dengan perkembangan zaman, seseorang semakin banyak mendefinisikan arti komunikasi. Tidak ada definisi yang paling benar dan juga paling salah. Definisi komunikasi dilihat dari kemanfaatan untuk menjelaskan fenomena yang di definisikan dengan mengevaluasinya. Definisi tersebut bisa dijelaskan secara meluas ataupun mempersempit pemaknaannya.

Menurut John R. Wenburg dan Wilmot setidaknya ada tiga kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai transaksi . komunikasi sebagai tindakan satu arah, yakni komunikasi mengacu pada sumber dan mengisyaratkan

<sup>27</sup> Cangara, Hafied, 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 20





sebagai kegiatan yang disengaja, untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan komunikator<sup>28</sup>

### 3. Perencanaan Komunikasi

#### a. Definisi Perencanaan Komunikasi

Melihat pengertian perencanaan komunikasi terdapat dua unsur penting yaitu perencanaan dan komunikasi. Menurut Waterston mendefinisikan perencanaan adalah usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>29</sup> Sedangkan komunikasi menurut Carl I. Hovland, mengatakan komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Sedangkan Ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.<sup>30</sup>

Berikut pengertian dari perencanaan komunikasi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut Robin Mehall Perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen yang tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam dan dalam jangka waktu beberapa lama hal itu bias dicapai, bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut.<sup>31</sup>

Sumber daya komunikasi dialokasikan untuk mencapai tujuan organisasi, agar tujuan tercapai dengan baik dan benar,

<sup>28</sup> Mulyana, Deddy, 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 1

<sup>29</sup> Hafied Cangara, 2013. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm 22

<sup>30</sup> Onong Uchana Efendy. 2002, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 10

<sup>31</sup> Hafied Cangara. 2010., *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 20



hal tersebutlah yang dikatakan proses dalam perencanaan komunikasi Menurut John Middleton.<sup>32</sup>

Perencanaan komunikasi merupakan hal mendasar yang perlu diperlukan dalam suatu kegiatan-kegiatan apapun, utamanya dalam memperkenalkan atau memasarkan produk, ide, dan gagasan. Setelah memahami proses perencanaan dan elemen-elemen komunikasi dalam suatu organisasi dapat ditemukan beberapa hal yang dapat merupakan masalah dalam perencanaan komunikasi.<sup>33</sup>

#### b. Pendekatan dalam Perencanaan Komunikasi

Banfield dan Meyerson dalam Sholihin menyatakan pendekatan perencanaan pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara.<sup>34</sup>

- 1) Pendekatan Perencanaan Rasional Menyeluruh
  - a) Perencanaan Rasional Menyeluruh adalah pendekatan perencanaan yang dilandasi suatu kebijaksanaan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan.
  - b) Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap menyeluruh dan terpadu.
  - c) Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi.
- 2) Pendekatan Perencanaan Terpilah
  - a) Perencanaan terpilah adalah pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian-bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan.

<sup>32</sup> Hafied Cangara. 2010., *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 20

<sup>33</sup> Amri Syarif Hidayat, 2015. *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasinya*, (Solo: Pustaka Iltizam, hlm.76

<sup>34</sup> Hafied Cangara. 2010., *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 27



- b) Pendekatan Perencanaan Terpilah dalam pelaksanaannya lebih mudah dan realitis

### c. Model Perencanaan Komunikasi

Penelitian ini menggunakan model perencanaan komunikasi Cultip, Center dan Broom sebagai berikut :

#### 1) Model Perencanaan Komunikasi Cultip Center dan Broom

Empat proses pokok menurut Scoot M. Cultip Allen H. Center mengenai menyatakan bahwa proses perencanaan komunikasi yaitu menjadi landasan atau acuan untuk melakukan pelaksanaan, yaitu.<sup>35</sup>

##### a) Penemuan Fakta (*Fact Finding*)

Langkah pertama ini melibatkan pengkajian dan pemantauan pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku yang terkait dengan tindakan dan kebijakan organisasi. Langkah menentukan “Apa yang sedang terjadi sekarang?”

##### b) Perencanaan (*Planning*)

Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan mengenai public, sasaran, tindakan dan strategi komunikasi, taktik, dan tujuan program. Langkah kedua ini menjawab, “Kita telah mempelajari situasi ini berdasarkan apa –apa yang harus diubah, dilakukan, atau dikatakan.”

##### c) Komunikasi (*Communication*)

Langkah ketiga melibatkan implementasi program dari tindakan dan komunikasi yang telah didesain untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap

<sup>35</sup> Rosady Ruslan, 2006. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 148-149



public untuk mencapai sasaran program. Pertanyaan pada langkah ini, “Siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program ini, serta kapan, dimana, dan bagaimana.”

d) Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap ini terakhir pada proses ini melibatkan kesiapan penilaian, implementasi, dan hasil dari program terimplementasi.

**d. Pentingnya Perencanaan Komunikasi**

David M. Dozier meringkas pentingnya perencanaan. Proses menentukan tujuan dan sasaran public relation dalam bentuk yang terukur memiliki dua fungsi. Pertama pemilihan tujuan serta sasaran public relations yang strategis dan dilakukan dengan hati-hati terkait dengan pertumbuhan dan keberlangsungan hidup organisasi yang berfungsi untuk menjustifikasi program public relations sebagai aktivitas manajemen yang dapat terus berjalan. Kedua, spesifikasi tujuan dan sasaran public relations dalam bentuk terukur menjadikan public relations dapat dipertanggungjawabkan serta membuat berhasil atau gagal nya program menjadi objektif dan konkret<sup>36</sup>

**4. Sosialisasi**

**a. Definisi Sosialisasi**

Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah suatu proses yang menempatkan anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di tempat dia menjadi anggota masyarakat. Sedangkan menurut Karel J. Veeger sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar, yang

<sup>36</sup> Dan lattimorre, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L. Toth, Public. 2010. *Relations profesi dan praktik*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm 130



artinya sosialisasi merupakan cara memberikan pemahaman dan pengertian kepada orang lain agar dapat saling mengerti.<sup>37</sup>

Sosialisasi merupakan pengertian yang mencakup proses memahami dalam dua arah, yaitu:

- 1) Masyarakat memahami siapa pengelola organisasi dan keberadaan organisasi.
- 2) Pengelola organisasi memahami masyarakat.<sup>38</sup>

Menurut pengertian definisi yang pertama sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk memperkenalkan diri dan mendiskusikan manfaat-manfaat yang diperoleh dari produk yang telah dibuat untuk masyarakat. Sedangkan pengertian yang kedua, sosialisasi adalah proses pengelola organisasi melebur dan memahami masyarakat. Proses sosialisasi dapat dipahami sebagai membuka pintu gerbang komunitas agar organisasi dan programnya diterima dan mendapat sambutan baik dari masyarakat.

Melalui proses sosialisasi, individu akan terwarnai cara berpikir dalam kebiasaan-kebiasaan hidupnya dengan proses sosialisasi, manusia menjadi tahu bagaimana ia harus bertingkah laku di tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Jadi dalam hal ini sosialisasi merupakan salah satu proses belajar kebudayaan dari anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sistem sosial.

#### **b. Tujuan Sosialisasi**

Utamanya tujuan dari sosialisasi ada lima yakni:

1. Agar setiap orang bisa hidup dengan baik di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya.

<sup>37</sup> Khaerani Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian*, (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), Hlm. 5.

<sup>38</sup> *ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Agar setiap orang bisa menyesuaikan tingkah lakunya dan beradaptasi sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Agar setiap orang bisa menyadari keberadaannya dalam lingkungan masyarakat. Warga masyarakat yang mengakui keberadaannya senantiasa mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari
4. Agar setiap orang bisa menjadi anggota masyarakat yang baik
5. Agar masyarakat tetap utuh, keutuhan masyarakat dapat terwujud apa bila di antara warga melakukan interaksi dengan baik, interaksi itu dilakukan sesuai peran masing-masing tanpa menyimpang dari nilai dan norma umum yang berlaku.<sup>39</sup>

## 5. E-PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan BUMN sebagai badan publik. Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat.<sup>40</sup>

Bawaslu memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan informasi publik serta sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairness*.

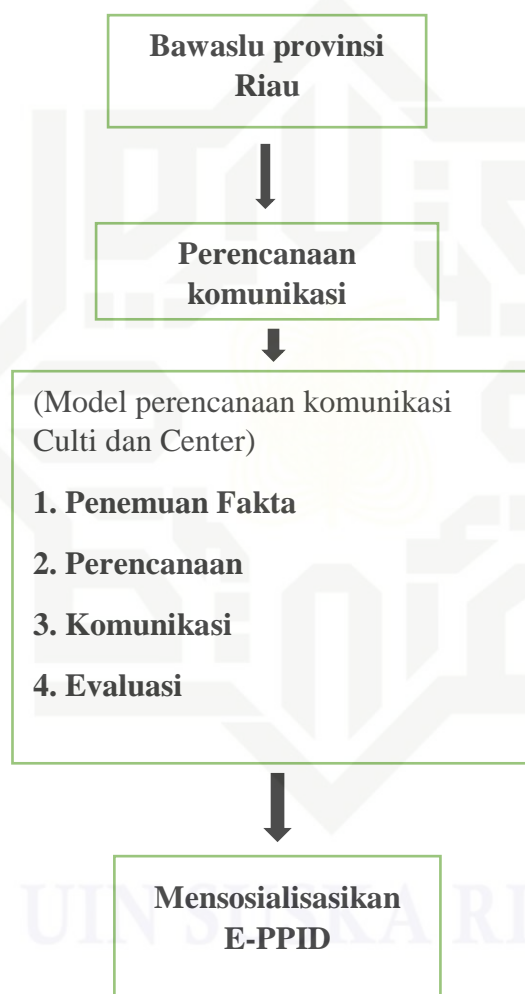
Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu dan BawasluI wajib memenuhi permohonan tersebut selama tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan/atau tidak memiliki dampak merugikan menurut uji konsekuensi. Permohonan informasi tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme dan standar

<sup>39</sup> Khaerani Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian*, (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018), hlm. 7.

<sup>40</sup> id.riau.bawaslu.go.id diakses pada 22 juni 2022

yang telah ditentukan. Untuk memenuhi pelayanan informasi tersebut, Bawaslu melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kantor Pusat melalui Keputusan Direksi. Pejabat ini dibantu oleh pejabat struktural yang ada dalam unit kerja di bawahnya sebagai bagian dari tim kerja pengelolaan informasi dan dokumentasi Bawaslu pada tanggal 25 Agustus 2021 Bawaslu RI secara resmi meluncurkan E-PPID

### 2.3 Kerangka Berpikir



**Gambar 2.1**

(Sumber olahan penulis data 2022)

Berdasarkan kajian teori yang penulis bahas, penulis mencoba mendeskripsikan langkah dan tahapan yang muncul dari fikiran sehingga terbentuk rancangan yang tepat untuk dapat diteliti dan dianalisis.

Bawaslu Provinsi Riau dalam mensosialisasikan E-PPID:

#### 1. Penemuan Fakta

Adapun penemuan fakta yang dilakukan Bawaslu provinsi Riau melalui database, artinya melibatkan riset dan opini untuk melihat kondisi dan situasi yang sedang terjadi pada kabupaten/kota yang sudah mulai mengakses E-PPID,

#### 2. Perencanaan (*Planning*)

Bawaslu Provinsi Riau dalam perencanaan menentukan Komunikator, Rancangan Pesan, Media yang digunakan, Target Sasaran, Metode Program

#### 3. Komunikasi (*Communication*)

Aksi komunikasi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi melalui media social, dan website resmi. melaksanakan Rapat kordinasi kepada Bawaslu tingkat kabupaten/ kota se provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada stakeholder beberapa instansi

#### 4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan Bawaslu Provinsi Riau untuk melihat tingkat keberhasilan, kelebihan ataupun kekurangan, keterlibatan evaluasi,urgensi dari evaluasi serta pada setiap aksi komunikasi, evaluasi dilakukan saat rapat evaluasi.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>41</sup>

Berdasarkan rumusan masalah yang di teliti, penulis menggunakan metode kualitatif jenis fenomena. Penelitian kualitatif adalah menggambarkan, menjelaskan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.<sup>42</sup>

Tahapan awal peneliti lakukan yaitu observasi lapangan melihat fenomena yang terjadi lembaga bawaslu Riau, selanjutnya peneliti melakukan pra riset mengumpulkan referensi teori berdasarkan fenomena lapangan, dan terakhir peneliti melakukan tahapan riset dengan wawancara dan mengumpulkan data, dokumentasi tentang fenomena yang terjadi di Bawaslu Riau

<sup>41</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodolog Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 28.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, 1997. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka Cipta, 105.



### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu Provinsi Riau. Adi Sucipto, Komplek Transito No.284 Kota Pekanbaru

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan. Dimulai Maret dari sampai dengan Juni 2022

### 3.3 Sumber Data/ Informasi Penelitian

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli peneliti (langsung dan informan) yang memiliki informasi atau data tersebut<sup>43</sup>. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari narasumber PPID yang sudah ditentukan

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, data diambil dari sumber asli) yang memiliki informasi atau data tersebut<sup>44</sup>. Data Sekunder dari penelitian ini adalah Dokumentasi Bawaslu Provinsi Riau, Jurnal, Koran, dan Website resmi.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini, maka informan dapat dikatakan sama dengan orang yang dapat memberikan informasi yang di butuhkan oleh penulis. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bawaslu Provinsi Riau

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penentuan informan penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.

<sup>43</sup> Muhammad Idrus, 2009 *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga., 86.

<sup>44</sup> Ibid, 86.

Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>45</sup>. Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Maka dari itu peneliti memilih secara sengaja informan penelitian tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci ini merupakan seseorang yang memahami dan dapat memberikan informasi berdasarkan penelitian yang dilakukan dan tidak dibatas dengan wilayah tempat tinggal. Sedangkan informan pendukung, yaitu orang-orang yang berada disekitar wilayah penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi terkait masalah yang diteliti

Dalam penelitian ini jumlah informan yaitu 3 (tiga) orang, yang mana terbagi menjadi informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah Dona Donara, S.E selaku Kabag Hukum, Humas, dan Datin dan Hasanul Asy' Ary, S.H.selaku Korsub Hukum, Humas, dan Datin karena beliau dianggap dapat menjadi kunci sumber informasi.Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah Alfian,SE selaku Staff Divisi Hukum, Humas, dan Datin dan Shafiyyah Irma Simatupang dari Bawaslu Provinsi Riau

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Dona Donara, S.E	Kabag Hukum, Humas, dan Datin
2	Hasanul Asy' Ary, S.H.	Korsub Hukum, Humas, dan Datin
3	Alfian,SE	Divisi Hukum, Humas, dan Datin
4	Shafiyyah Irma Simatupang	Masyarakat Riau

<sup>45</sup>Sugiyono,2016 *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Yogyakarta: Alfabeta, hlm 85.



### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian<sup>46</sup>.

Penelitian ini mengumpulkan data melaluia wawancara jenis *structured* dimana peneliti memiliki list daftar pertanyaan yang sudah di buat. Wawancara dalam penelitian ini dilakaukan dengan cara peneliti (pewawancara) mengajukan pertanyaan kepada informan nya, yaitu Dona Donara, S.E selaku Kabag Hukum, Humas, dan Datin, Hasanul Asy'Ary, S.H. selaku Korsub Hukum, Humas, dan Datin dan Alfian,SE selaku Divisi Hukum, Humas, dan Datin Semua informan di berikan pertanyaan satu persatu guna mendapat lebih banyak informasi

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda kegiatan, program kerja, anggaran dasar rumah tangga, serta dokumen penting lainnya<sup>47</sup>.

Dokumen dikumpulkan dari peninggalan tertulis seperti buku-buku, tentang Public Relation, dan yang berhubungan dengan penelitian

Dalam pengumpulan data dokumen peneliti melakukan cara yaitu melakukan kunjungan langsung ke Bawaslu Provinsi Riau pada 7 Juni 2022 untuk mendapatkan data tentang bagaimana perencanaan komunikasi yang dilakukann oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam mensosialisasikan E-PPID

<sup>46</sup> Iqbal Hasan. 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

<sup>47</sup> 53 Ibid, 11.



### 3. Observasi

Adanya observasi peneliti dapat mengetahui bagaimana tentang kegiatan Bawaslu provinsi Riau dalam mensosialisasikan E-PPID. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.<sup>48</sup>

Dalam pengumpulan data dokumen peneliti melakukan cara yaitu melakukan kunjungan langsung ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 07 Juni 2022 dengan melihat program program yang di siapkan oleh Bawaslu provinsi Riau guna mensosialisasikan E-PPID

#### 3.6 Validitas Data

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur<sup>49</sup>.

Validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obejek

Pada penelitian ini peneliti malakukan validitas dengan metode triangulasi data. Triangulasi data dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>50</sup>

Dalam penelitan ini menggunakan trigulasi sumber dimana peneliti dapat mendapatkan berbagai macam data dari bermacam-macam sumber yang bersangkutan dengan penelitian. Dengan banyak nya sumber yang didapat maka kebenarannya akan terlihat lebih jelas.

<sup>48</sup> Agustinus Bandur, 2014 Penelitian Kualitatif: *Metodologi, Desain , dan Teknik Analisis Data Degan NVIVO 10*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm, 91.

<sup>49</sup> Syofian Siregar, 2011 *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 162.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2019), Hlm. 361.



### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain<sup>51</sup>.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan teorinya *Miles* dan *Huberman* dalam “Pawito” menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut interactive model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen : 1). Reduksi data (*data reduction*), 2). Penyajian data (*data display*), 3). Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*)<sup>52</sup>.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok- kelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin beberapa paragraf. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema, pola, atau kelompok-kelompok data bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa peneliti akan mendapatkan data yang sangat sulit untuk diidentifikasi pola serta temanya, atau mungkin kurang relevan untuk

<sup>51</sup>Ibid, 200.

<sup>52</sup> Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Lkis, Yogyakarta,



tujuan penelitian sehingga data-data bersangkutan terpaksa harus disimpan (diredusir) dan tidak termasuk yang akan dianalisis.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Penting diingat bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis-analisis. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data.

## 3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, hal. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Sejarah Bawaslu

##### 1. Awal Pembentukan Bawaslu Provinsi Riau

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau mulai di bentuk setelah dibuatnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum. .Pasal 69 undang-undang ini, menyebutkan Bawaslu Provinsi bersifat tetap. Pada pasal 73 ayat (4) huruf d dimana menjelaskan bahwasanya memberi kewenangan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk membentuk Bawaslu tingkat Provinsi di setiap daerahnya.Selanjutnya posisi Bawaslu Provinsi merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya sejajar dengan Komisi pemilihan umum atau biasa di kenal dengan KPU, hal ini sudah diatur dalam Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945.

Bawaslu Riau merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diwilayah Provinsi Riau. Anggota Bawaslu Riau terdiri dari individu yang memiliki kemampuan dalam pengawasan Pemilu dan pilkada, serta tidak bergabung atau berafiliasi dalam partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya yang sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 anggota Bawaslu Provinsi Ria dibantu Sekretariat yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Sekretariat Bawaslu tingkat Provinsi memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu Provinsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang terdiri atas 3 Sub bagian, yait Sub bagian Administrasi, Sub Bagian



Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), dan Sub bagian Hukum, Humas dan Hubungan antar lembaga.<sup>54</sup>

Awal dibentuknya anggota bawaslu provinsi riau, di era awalnya pada periode 2012-2017 Edy Syarifuddin, S.Ag, Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si dan Rusdi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I. Dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) dan surat edaran (SE) dari Bawaslu, tiga pimpinan Bawaslu Provinsi Riau Menghadap Gubernur Riau yang pada saat itu menjabat yaitu Bapak Rusli Zaenal

Segenap proses seleksi yang harus dilalui untuk menjadi anggota bawaslu provinsi riau cukup panjang dan tidak mudah Mulai dari penelitian administrasi bakal calon; seleksi tertulis; tes kesehatan; tes psikologi; wawancara sampai uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu.

Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi Riau diketuai oleh Prof Dr. H. Sudirman M. Johan, MA, Sekretaris, Baidarus, MM., M.Ag, dan anggota, Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH M.Hum, Drs. H. Levna Ervan, M.M, dan Drs. H. Safri Yus.

Beratnya seleksi untuk mengikuti tes sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi Riau ini, dapat diketahui dari pengalaman anggota Bawaslu Provinsi Riau yang merupakan tokoh utama dalam buku sejarah Bawaslu Provinsi Riau ini, mulai dari pembentukan sampai dilantik dan melaksanakan tugas sebagai struktural anggota Bawaslu Provinsi Riau.<sup>55</sup>

Tim Seleksi membuka pendaftaran calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau periode 2012-2017, pada tanggal 5 s.d. 11 Agustus 2012. Selama 7 (tujuh) hari pembukaan pendaftaran, terjaring 70 pelamar mengambil formulir. Namun, hanya 48 pelamar yang mengembalikan formulir ke Sekretariat Tim Seleksi.

<sup>54</sup> 4 Andis Susilawan Dkk. *Sejarah Bawaslu Riau, (Riau: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016), Hlm.1.*

<sup>55</sup> *ibid*



Hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 14 Agustus 2012, terdapat 32 pelamar yang lulus seleksi administrasi, dan 16 pelamar tidak lulus. Mayoritas pelamar tidak lulus disebabkan karena tidak melampirkan legalisir ijazah sesuai persyaratan yaitu mulai dari SD, SMP hingga jenjang pendidikan lebih tinggi.

Peserta yang lulus seleksi administrasi selanjutnya menjalani tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi. Dari 48 pelamar diambil 12 orang berdasarkan nilai tertinggi. Pelamar yang dinyatakan lulus kemudian menjalani tes wawancara pada tanggal 4 s.d. 5 September 2012

Berdasarkan hasil tes wawancara, ditetapkan 6 (enam) calon, yaitu: Ahdanan, S.Ag., M.Pd., Edy Syarifuddin, S.Ag, Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Nurhamin, S.Pt., M.H., Roby Afriyan, S.Ag., M.Si., dan Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I., selanjutnya 6 calon ini diserahkan kepada Bawaslu untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Uji kelayakan dan kepatutan merupakan tes terakhir yang diikuti calon anggota Bawaslu Provinsi Riau. Dari hasil tes tersebut, terpilihlah Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin, S.Ag sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Riau periode 2012-2017.

Pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu melantik Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I dan Edy Syarifuddin, S.Ag, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Riau di Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 585-Kep Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Dengan demikian, pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu Provinsi Riau secara resmi terbentuk.<sup>56</sup>

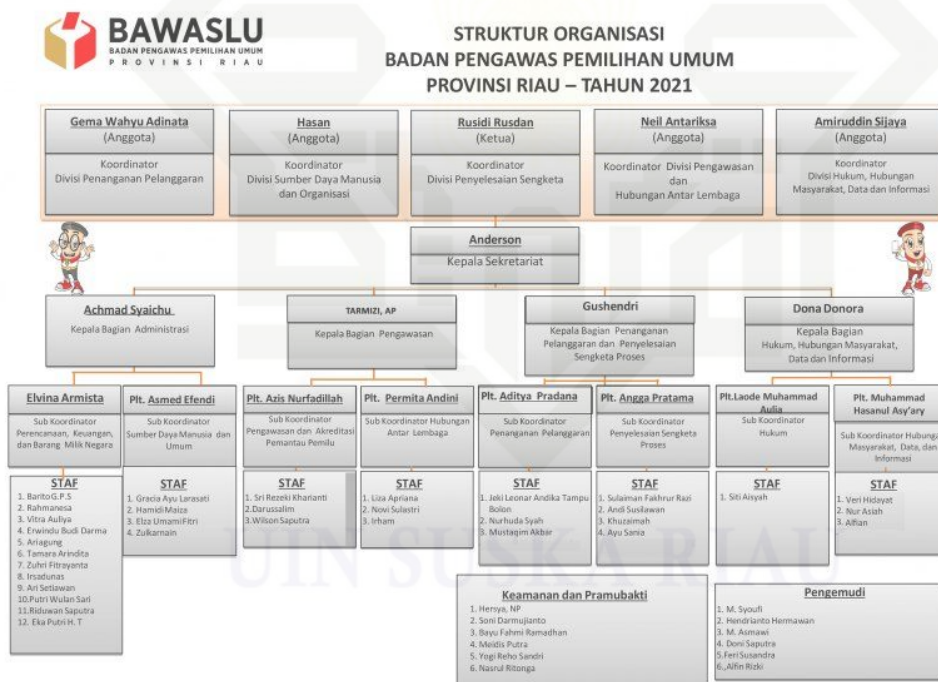
<sup>56</sup> Andis Susilawan Dkk. *Sejarah Bawaslu Riau, (Riau: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016), Hlm.1.*



Setelah dilaksanakan pembekalan di Jakarta, ketiga Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau segera melakukan pleno untuk memilih Ketua. Berdasarkan hasil pleno, terpilih Edy Syarifuddin sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Riau, yang disepakati akan dilakukan pertukaran ketua masa bakti 2.5 tahun dari Edy Syarifuddin kepada Rusidi Rusdan.

Dihadapan ketiga pimpinan, sudah menunggu beban tugas yang cukup berat, bisa dibayangkan dengan keanggotaan yang hanya tiga orang, belum ada kantor dan pegawai sekretariat serta sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya, benar-benar dari nol dan hanya bermodalkan Surat Keputusan dari Bawaslu. Seringkali ketiga pimpinan mengadakan rapat di kantin Pustaka Wilayah Kota Pekanbaru, bahkan di dalam mobil anggota Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan untuk menyusun program kerja.

### 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Riau



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 4.3 Visi dan Misi Bawaslu Riau

#### 1. VISI

Menjadi di lembaga pengawas pemilu yang terpercaya di wilayah provinsi Riau

#### 2. MISI

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri yang solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri

### 4.4 Logo bawaslu



Gambar 4.2 Logo Bawaslu Riau

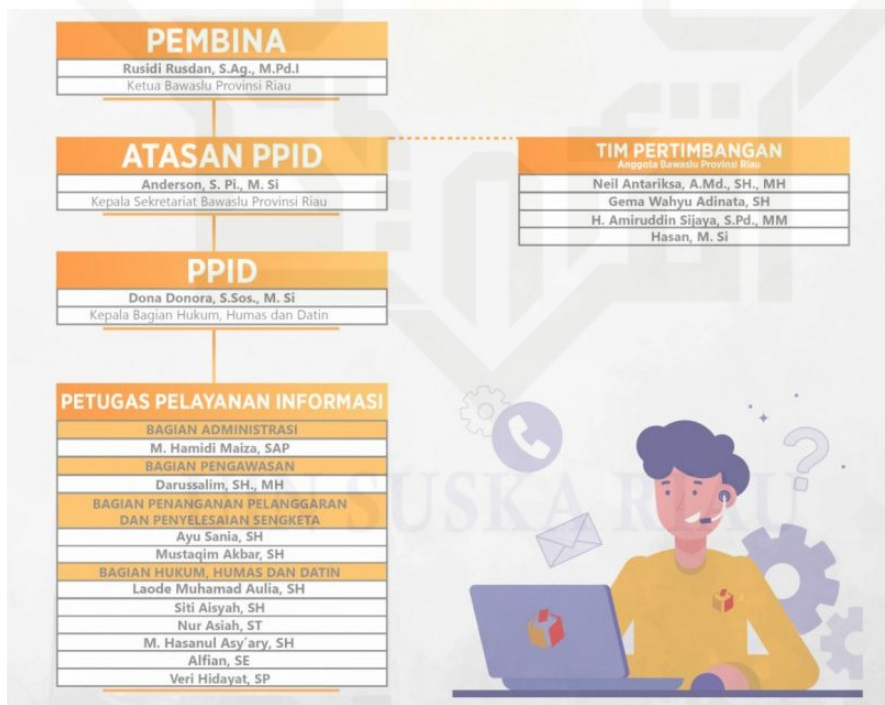
#### 4.5 Profil PPID Bawaslu Riau

Bawaslu Provinsi Riau menilai terkait keterbukaan informasi tidak hanya pesan amanah regulasi atau undang-undang. Keterbukaan informasi bagian dari kewajiban yang memang harus dipatuhi. Sebab, hal yang terkait ini merupakan hak yang wajib di terima oleh publik<sup>57</sup>

Untuk itulah Bawaslu Provinsi Riau membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan atas hak informasi publik. PPID Bawaslu Provinsi Riau terbentuk sejak tahun 2017. Pembentukan ini menyusul terbitnya Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi.

Maka pada April 2020, Bawaslu Riau mengeluarkan surat keputusan pembentukan PPID. tertuang dalam Keputusan Ketua Bawaslu Riau Nomor: 025/K.RI/HK.01.01/IV/2020 tentang pembentukan Tim Pelaksana PPID Bawaslu Provinsi Riau.

#### 4.6 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Provinsi Riau



Gambar 4.3 Struktur Organisasi PPID Bawaslu Riau

<sup>57</sup> <https://ppid.riau.bawaslu.go.id> diakses pada 22 Juni 2022



## 4.7 Tugas dan Wewenang PPID

### 1. Pembina PPID bertugas:

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- 3) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- 4) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

### 2. Tim pertimbangan memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- 1) Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2) Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- 3) Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- 4) Penyusunan daftar Informasi Publik; Penyusunan Laporan Layanan; dan Penanganan Sengketa Informasi Publik.

### 3. Atasan PPID bertugas:

- 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik
- 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- 4) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.<sup>58</sup>

### 4. PPID bertugas:

- 1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

<sup>58</sup> <https://Ppid.Riau.Bawaslu.Go.Id/> Diakses Pada 23 Juni 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- 3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- 4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- 5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- 7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- 8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- 9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- 10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- 11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

#### 5. PPID berwenang:

- 1) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2) Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- 3) Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- 4) Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja;



## 6. Petugas pelayanan Informas bertugas :

- 1) Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
- 2) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
- 3) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- 7) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

### 4.8 Visi dan Misi PPID Bawaslu Riau

#### VISI

Terwujudnya PPID Bawaslu yang andal ,Profesional,dan Inovatif

#### MISI

- 1) Memenuhi hak publik atas informasi
- 2) Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu
- 3) Mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel<sup>59</sup>

### 4.9 Logo PPID Bawaslu Riau



Gambar 4.4 Logo PPID bawaslu Riau

<sup>59</sup> <https://Ppid.Riau.Bawaslu.Go.Id/> Diakses Pada 23 Juni 2022.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilangan yang telah peneliti lakukan menghasilkan kesimpulan Perencanaan Komunikasi Bawaslu Riau dalam mensosialisasikan E-PPID diidentifikasi menjadi 4 tahapan berdasarkan teori perencanaan komunikasi model Cultip,Center dan Broom, yaitu: Penemuan Fakta, dilakukan dengan cara mengenalkan tentang sistem E-PPID kepada kalangan masyarakat, E-PPID yang merupakan sistem yang terbilang baru dan merupakan program yang terintegrasi dengan Bawaslu RI, dan penemuan fakta yang terjadi dilapangan adalah E-PPID yang terbilang masih baru ialah masih minimnya keterlibatan masyarakat terkait adanya E-PPID dilihat dari data pemohon informasi yang belum ada kenaikan yang signifikan, lalu Perencanaan Bawaslu provinsi Riau dengan macam kegiatan rapat koordinasi persiapan E-PPID serta menjalankan Progam pendukung guna menaikkan partisipasi masyarakat dalam mencari kebutuhan informasi kepemiluan dan non kepemiluan ,lalu komunikasi yang dilakukan oleh bawaslu Provinsi Riau itu sendiri terbagi dalam dua bentuk yaitu langsung dan tidak langsung,komunikasi langsung dengan cara membangun komunikasi dengan stakeholder sebuah instansi dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang berkunjung kekantor dan komunikasi tidak langsung dengan bantuan media sosial sebagai wadahnya, evaluasi perencanaan komunikasi Bawaslu Riau dalam mensosialisasikan E-PPID dilaksanakan dengan teknis seluruh jajaran dari Bawaslu Provinsi Riau,evaluasi yang dilakukan setelah menjalankan program pendukung E-PPID dan evaluasi berkala yang dilakukan dua kali dalam satu tahun,evaluasi sangat fundamental harus dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan Bawaslu Provinsi Riau terhadap E-PPID ini

## A. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan penulis, saran yang dapat dijabarkan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bawaslu Provinsi Riau agar terus mengkomunikasikan terus secara berkala kepada masyarakat terkait E-PPID ini, selain komunikasi melalui *stakeholder*, Bawaslu Provinsi Riau juga bisa turun langsung ke masyarakat
2. Diharapkan juga agar program program kegiatan penunjang E-PPID yang telah di lakukan Bawaslu Provinsi Riau bisa di kembangkan agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahuinya
3. Diharapkan kepada peneliti yang lain, yang ingin melakukan penelitian yang serupa, agar dapat mengkaji masalah dengan lingkup yang luas dan dapat menggunakan teori yang berbeda dari yang penulis cantumkan agar dapat menambah wawasan bagi orang lain



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anggoro, Linggar. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhineka Cipta, 1997
- Cangara, Hafied. *perencanaan dan strategi komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2013
- Effendy. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Hidayat, Amri, *Perencanaan Komunikasi Hakekat dan Implementasi*, Solo: Iltizam, 2015
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Morisan, *Manajemen Publik Relations*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Morisan *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Periklanan : *Komunikasi Pemasaran terpadu*, Periklanan : *Komunikasi Pemasaran terpadu*, Jakarta : Kencana, 2010
- Mulyana. *Komunikasi Efektif : Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008
- Riswandi. *Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Imu, 2009
- Rusdan Rosady. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2000





- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi, Gramata Publising. 2014
- Khaerani Kurniawati, *Sosialisasi Kepribadian*, (Yogyakarta: Sentra Edukasi Media, 2018
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodolog Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Andis Susilawan Dkk. *Sejarah Bawaslu Riau*, (Riau: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, 2016
- Anwar Prabu, *Management Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Remaja Rosda Karya: 2011
- Hendra, *Perencanaan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Usman, Nurdin.. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Zaenal Arifin. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: (PT. Remaja Rosdakarya. 2009
- Hendra, *Perencanaan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ruslan, Rosady, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2019),
- Sutaryo, “*Dasar-Dasar Sosialisasi*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2004),
- Ibnu Hamad, “*Pengertian Perencanaan Program Komunikasi (PPK)*”, Modul Ilmiah, 2014



### Skripsi dan Jurnal :

Batoebara, Maria Ulfa, And Junaidi “*Perencanaan Komunikasi Fasilitator Kesehatan Dalam Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).*” Warta Dharmawangsa, 2018

Kenda, Ndoheba. “*Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.*” Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 2015

Liesmaya, Neng Lasmy, Idi Dimyati, And Puspita Asri Praceka. “*Strategi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Polda Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik.*”, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018

Ningtyas, Ceria Isra, Agus Rusmana, And Jenny Ratna Suminar. “*Indeks Kompetensi Pengelolaan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Pertanian.*” Jurnal Perpustakaan Pertanian,

Triyandra, Annisa Citra. “*Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Program Smart City*”, 2017

Batoebara, Maria Ulfa, and Junaidi Junaidi. “*Perencanaan Komunikasi Fasilitator Kesehatan Dalam Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).*” 2017

Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 10*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Kenda, Ndoheba. “*Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.*” Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik :2015

Triyandra, Annisa Citra. “*Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Program Smart City*” 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Internet:**

<https://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/13>, diakses pada 28 Agustus 2021

Website resmi Bawaslu RI, dalam: <https://bawaslu.go.id/> diakses pada 22 juni 2022

<https://riau.bawaslu.go.id/> diakses pada 23 juni 2022

<https://ppid.riau.bawaslu.go.id/> diakses pada 23 juni 2022



## Lampiran 1

### DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Wawancara dengan Ibu Dona Donara S.E selaku Kabaga Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Wawancara dengan Bapak Hasanul Asy'ary S.H Korsub Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



**Wawancara dengan Bapak Alfian S.E selaku Staff Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Riau**



**Wawancara dengan Shafiyah Irma Simatupang selaku Masyarakat Provinsi Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS



**M YUNUS**, lahir di Kabupaten Cirebon, Desa Pangurangan Kecamatan Pangurangan pada 23 Februari 1999, merupakan anak kedua dari Bapak Casnato dan Ibu Arifah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Jatisari II Kota Bekasi, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 24 Kota Bekasi di lanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 11 Kota Bekasi, Pada tahun 2017 penulis kemudian melanjutkan studi di jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan konsentrasi Public Relations

Selama Menjadi Mahasiswa Aktif di kampus maupun diluar kampus, penulis aktif diberbagai organisasi mahasiswa intra kampus dan organisasi mahasiswa ekstra kampus. Penulis bergabung di Himpunan Mahasiwa Islam pada tahun 2017 dan pernah menjadi Sekretaris Umum di Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2020/2021, Kepala Divisi Sosial Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di Dewan Eksekutif Mahasiswa tahun 2019, Anggota Himakom Pada tahun 2018, dan Pernah Menjadi anggota Perhumas Muda Korti UIN Suska Riau pada tahun 2018